



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMAATAN SAMBENG  
DESA GARUNG**

*Alamat: Jalan Raya Garung No : 06 Garung 62284*

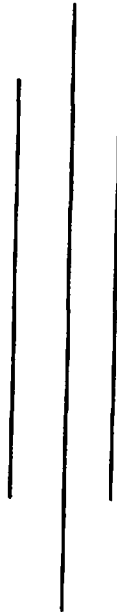
---

**PERATURAN DESA GARUNG**

**NOMOR :01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GARUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**Perdes APBD Garung Tahun 2013**

**KECAMATAN SAMBENG**  
**PEMERINTAH DESA GARUNG**  
**PERATURAN DESA GARUNG KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GARUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GARUNG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Garung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA GARUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GARUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 419.050.000 Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah.**

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 419.050.000 |
| b. Belanja        |                 |
| 1) Langsung       | Rp. 204.700.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 214.350.000 |
| c. Pembiayaan     |                 |
| 1) Penerimaan     | Rp. 419.050.000 |
| 2) Pengeluaran    | Rp. 419.050.000 |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garung  
Pada tanggal 20 Maret 2013



**ANGGARAN PENPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA GARUNG KECAMATAN SAMBENG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Lampiran Peraturan Desa Garung Kec.Sambeng  
Kab. Lamongan  
Nomor : 01 Tahun 2012  
Tanggal : 5 Maret 2013  
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Bela Desa Garung

| KODE REKENING    | URAIAN                                                | TAHUN SEBELUMNYA (Rp) | TAHUN BERJALAN (Rp) | KETERANGAN |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 1                | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5          |
| <b>1</b>         | <b>PENDAPATAN</b>                                     |                       |                     |            |
| <b>1.1</b>       | <b>Pendapatan Asli Desa</b>                           |                       |                     |            |
| <b>1.1.1</b>     | <b>Hasil Usaha Desa</b>                               |                       |                     |            |
| <b>1.1.1.1</b>   | Bumdes Air Bersih                                     | 300.000               | 300.000             |            |
| <b>1.1.1.2</b>   | Hasil Usaha Koperasi Desa                             |                       |                     |            |
| <b>1.1.1.3</b>   | Hasil Usaha PKK                                       |                       |                     |            |
| <b>1.1.1.4</b>   | Dst. ....                                             |                       |                     |            |
| <b>1.1.2</b>     | <b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>                |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.1</b>   | <b>Tanah Kas Desa</b>                                 |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.1.1</b> | TANAH DESA (Sewa tanah/ Suguu dayuh/ Pager kiks dll.) | 9.000.000             | 11.500.000          |            |
| <b>1.1.2.1.2</b> | Sewa Bengkok( kades/ perangkat desa lainnya dll.)     | 0                     | 24.700.000          |            |
| <b>1.1.2.1.3</b> | Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS                           | 3.250.000             | 3.250.000           |            |
| <b>1.1.2.1.4</b> | Sewa Tanah Desa lainnya                               |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.2</b>   | Pasar Desa                                            |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.3</b>   | Pasar Hewan                                           |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.4</b>   | Penyebangan Perahu milik Desa                         |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.5</b>   | Sewa Bangunan milik Desa                              |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.6</b>   | Tempat Pelelangan Ikan milik Desa                     |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.7</b>   | Lain-lain Kekayaan milik Desa                         |                       |                     |            |
| <b>1.1.2.8</b>   | Dst. ....                                             |                       |                     |            |
| <b>1.1.3</b>     | <b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>                  |                       |                     |            |
| <b>1.1.3.1</b>   | Swadaya penunjang ADD dan Bansun                      | 10.500.000            | 10.000.000          |            |
| <b>1.1.3.2</b>   | Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan               | 3.000.000,00          | -                   |            |
| <b>1.1.3.3</b>   | Swadaya Pembangunan Kantor Desa                       | 38.000.000            | 8.000.000           |            |
| <b>1.1.3.4</b>   | Swadaya Sawah Tambak                                  |                       |                     |            |
|                  | Dst. ....                                             |                       |                     |            |
| <b>1.1.4</b>     | <b>Hasil Gotong Royong</b>                            | 10.000.000            | 15.500.000          |            |
| <b>1.1.4.1</b>   | Gotong royong dinilai dengan uang                     |                       |                     |            |
| <b>1.1.4.2</b>   | Dst.....                                              |                       |                     |            |
| <b>1.1.5</b>     | <b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>        | 2.000.000             | 2.100.000           |            |
| <b>1.1.5.1</b>   | Legel surat menyurat                                  | 750.000               | 800.000             |            |
| <b>1.1.5.2</b>   | Legel jual beli Tanah                                 | 300.000               | 300.000             |            |
| <b>1.1.5.3</b>   | Leges NTCR                                            |                       |                     |            |
| <b>1.1.5.4</b>   | Punggutan usaha batu bata/ genteng                    |                       |                     |            |
| <b>1.1.5.5</b>   | Sewa Handtraktor                                      |                       |                     |            |
| <b>1.1.5.6</b>   | Hasil Infaq dan shodakoh                              |                       |                     |            |
| <b>1.2</b>       | <b>Bagi Hasil Pajak :</b>                             |                       |                     |            |
| <b>1.2.1</b>     | <b>Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ kota</b>               | 1.200.000,00          | 1.200.000,00        |            |
| <b>1.2.2.1</b>   | Intensif PBB                                          |                       |                     |            |
| <b>1.2.2.2</b>   | Dst. ....                                             |                       |                     |            |
| <b>1.3</b>       | <b>Bagi Hasil Retribusi</b>                           |                       |                     |            |
| <b>1.3.1</b>     | Retribusi tempat wisata                               |                       |                     |            |
| <b>1.3.2</b>     | Retribusi pasar desa                                  |                       |                     |            |

| 1       | 2                                                                      | 3              | 4              | 5 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|
| 1,4     | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah                      |                |                |   |
| 1.4.1   | ADD                                                                    | 41.500.000     | 41.500.000     |   |
| 1.4.2   | BANSUN                                                                 | 1.100.000      | 11.000.000     |   |
| 1.4.3   | Dst.....                                                               |                |                |   |
| 1,5     | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya |                |                |   |
| 1.5.1   | Bantuan Keuangan Pemerintah                                            |                |                |   |
| 1.5.1.1 | PMPN MP                                                                | 117.000.000,00 | 130.000.000,00 |   |
| 1.5.1.2 |                                                                        |                |                |   |
| 1.5.2   | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi                                   |                |                |   |
| 1.5.2.1 | Normalisasi DAM                                                        | 150.000.000,00 | -              |   |
| 1.5.2.3 | Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)                                    |                | 34.000.000,00  |   |
| 1.5.3   | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                             |                |                |   |
| 1.5.3.1 | TPAPD Kades                                                            | 9.000.000      | 10.200.000     |   |
| 1.5.3.2 | TPAPD Perangkat Desa                                                   | 48.000.000     | 54.600.000     |   |
| 1.5.3.3 | TPBPD                                                                  | 2.800.000      | 3.650.000      |   |
| 1.5.3.4 | Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa                                  |                |                |   |
| 1.5.3.5 | Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya                            |                |                |   |
| 1.5.3.6 | Kompensasi Sekdes non PNS                                              |                |                |   |
| 1.5.3.7 | Asuransi Kepala Desa                                                   | 1.000.000      | 1.000.000      |   |
| 1.5.3.8 | Bantuan Program E-KTP                                                  |                |                |   |
| 1.5.3.9 | Bantuan RT                                                             |                | 3.550.000      |   |
| 1.5.4   | Bantuan Keuangan Desa lainnya :                                        |                |                |   |
| 1.5.4.1 | Tunjangan kinerja Sekdes PNS                                           |                |                |   |
| 1.5.4.2 | Dst.....                                                               |                |                |   |
| 1,6     | Hibah                                                                  |                |                |   |
| 1.6.1   | Hibah dari pemerintah                                                  |                |                |   |
| 1.6.1.1 |                                                                        |                |                |   |
| 1.6.1.2 | Dst.....                                                               |                |                |   |
| 1.6.2   | Hibah dari pemerintah propinsi                                         |                |                |   |
| 1.6.2.1 |                                                                        |                |                |   |
| 1.6.2.2 | Dst.....                                                               |                |                |   |
| 1.6.3   | Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota                                   |                |                |   |
| 1.6.3.1 | Pembangunan Jalan Peros, Jembatan                                      | 30.000.000     | -              |   |
| 1.6.3.2 | Dst. ....                                                              |                |                |   |
| 1.6.4   | Hibah dari badan/organisasi/swasta                                     |                |                |   |
| 1.6.4.1 |                                                                        |                |                |   |
| 1.6.5   | Hibah dari kelompok masyarakat perorangan                              |                |                |   |
| 1.6.5.1 |                                                                        |                |                |   |
| 1,7     | Sumbangan Pihak Ketiga                                                 |                |                |   |
| 1.7.1   | Lowongan Pengisian Kades/Perangkat Desa Lainnya                        |                | 53.000.000     |   |
| 1.7.2   | Dst.....                                                               |                |                |   |
|         | JUMLAH PENDAPATAN<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)                     | 456.300.000    | 419.050.000    |   |

| 1                 | 2                                                                 | 3                     | 4                   | 5 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <b>2</b>          | <b>BELANJA</b>                                                    |                       |                     |   |
| <b>2,1</b>        | <b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>                       | <b>385.630.000</b>    | <b>204.700.000</b>  |   |
| <b>2.1.1</b>      | <b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>                                 |                       |                     |   |
| <b>2.1.1.1</b>    | <b>Honorarium Petugas pemunggut PBB</b>                           | <b>300.000</b>        | <b>500.000</b>      |   |
| <b>2.1.1.2</b>    | <b>Honorarium Petugas Linmas Desa</b>                             |                       |                     |   |
| <b>2.1.1.3</b>    | <b>Honorarium Pengurus RT/RW</b>                                  |                       |                     |   |
| <b>2.1.1.4</b>    | <b>Honorarium Kader Gizi</b>                                      |                       |                     |   |
| <b>2.1.1.5</b>    | <b>Honorarium Pengurus LPM</b>                                    |                       |                     |   |
| <b>2.1.1.6</b>    | <b>Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa</b>                |                       | <b>3.000.000</b>    |   |
| <b>2.1.1.9</b>    | <b>Biaya pelaksanaan PILKADES</b>                                 |                       | <b>50.000.000</b>   |   |
| <b>2.1.2</b>      | <b>Belanja Barang/Jasa</b>                                        |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.1</b>    | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                   |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.1.1</b>  | <b>Kepala Desa</b>                                                | <b>240.000</b>        | <b>240.000</b>      |   |
| <b>2.1.2.1.2</b>  | <b>Perjalanan Dinas Perangkat Desa</b>                            | <b>780.000</b>        | <b>780.000</b>      |   |
| <b>2.1.2.1.3</b>  | <b>Perjalanan Dinas LPM</b>                                       | <b>660.000</b>        | <b>660.000</b>      |   |
| <b>2.1.2.1.4</b>  | <b>Perjalanan Dinas Kader Gizi</b>                                | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>      |   |
| <b>2.1.2.1.5</b>  | <b>Dst.</b>                                                       |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.2</b>    | <b>Belanja Bahan/Material</b>                                     |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.2.1</b>  | <b>Belanja ATK</b>                                                | <b>1.500.000</b>      | <b>2.000.000</b>    |   |
| <b>2.1.2.2.2</b>  | <b>Belanja Peralatan Kantor</b>                                   | <b>150.000</b>        | <b>3.500.000</b>    |   |
| <b>2.1.2.2.3</b>  | <b>Pemeliharaan Kantor/Balai Desa</b>                             |                       | <b>1.500.000</b>    |   |
| <b>2.1.2.2.4</b>  | <b>Pembayaran Rekening Listrik</b>                                |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.2.5</b>  | <b>Pembayaran Rekening Telpon</b>                                 |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.2.6</b>  | <b>Pembayaran Rekening Air</b>                                    |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.2.7</b>  | <b>Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)kades</b>                 |                       | <b>500.000</b>      |   |
| <b>2.1.2.2.8</b>  | <b>Belanja Bahan / Material ADD</b>                               | <b>35.000.000</b>     | <b>41.500.000</b>   |   |
| <b>2.1.2.2.9</b>  | <b>Belanja Bahan /material Bansun</b>                             | <b>13.000.000</b>     | <b>11.000.000</b>   |   |
| <b>2.1.2.2.10</b> | <b>Belanja Material Jalan poros Desa</b>                          | <b>148.000.000,00</b> | <b>0</b>            |   |
| <b>2.1.2.2.11</b> | <b>Belanja Material Kantor/Balai Desa</b>                         | <b>15.000.000,00</b>  | <b>26.000.000</b>   |   |
| <b>2.1.2.2.12</b> | <b>Belanja Pembangunan Normalisasi DAM</b>                        | <b>150.000.000,00</b> |                     |   |
| <b>2.1.2.2.13</b> | <b>Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa</b>                       |                       |                     |   |
| <b>2.1.2.2.14</b> | <b>Pembangunan Masjid Desa</b>                                    |                       | <b>58.350.000</b>   |   |
| <b>2.1.3</b>      | <b>Belanja Modal</b>                                              |                       |                     |   |
| <b>2.1.3.1</b>    | <b>Belanja Modal Tanah</b>                                        |                       |                     |   |
| <b>2.1.3.2</b>    | <b>Belanja Modal Jaringan Listrik</b>                             |                       |                     |   |
| <b>2.1.3.3</b>    | <b>Belanja Modal Komputer</b>                                     |                       | <b>700.000,00</b>   |   |
| <b>2.1.3.4</b>    | <b>Belanja Modal Alat Fogging</b>                                 |                       |                     |   |
| <b>2.1.3.5</b>    | <b>Belanja Modal Pemotong rumput</b>                              |                       |                     |   |
| <b>2.1.3.6</b>    | <b>Belanja Modal Meubellair</b>                                   | <b>500.000,00</b>     | <b>4.000.000,00</b> |   |
| <b>2.1.3.7</b>    | <b>Dst. ....</b>                                                  |                       |                     |   |
| <b>2,2</b>        | <b>Belanja Tidak Langsung<br/>(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b> | <b>90.870.000</b>     | <b>214.360.000</b>  |   |
| <b>2.2.1</b>      | <b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>                          |                       |                     |   |
| <b>2.2.1.1</b>    | <b>Hasil Sewa Bengkok Kades</b>                                   | <b>1.800.000</b>      | <b>21.500.000</b>   |   |
| <b>2.2.1.2</b>    | <b>TPAPD Kades</b>                                                | <b>7.800.000</b>      | <b>10.200.000</b>   |   |
| <b>2.2.1.3</b>    | <b>Asuransi Kepala Desa</b>                                       | <b>1.000.000</b>      | <b>1.000.000</b>    |   |
| <b>2.2.1.2</b>    | <b>Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes</b>                         |                       |                     |   |
| <b>2.2.1.2.1</b>  | <b>Tunjangan Kinerja Sekdes PNS</b>                               |                       |                     |   |
| <b>2.2.1.2.2</b>  | <b>Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS</b>                          | <b>3.250.000</b>      | <b>3.250.000</b>    |   |
| <b>2.2.1.2.3</b>  | <b>TPAPD Sekdes non PNS</b>                                       |                       |                     |   |

| 1          | 2                                                           | 3                  | 4                  | 5 |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 2.2.1.3    | Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya          |                    |                    |   |
| 2.2.1.3.1  | Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya                   | 18.770.000         | 83.150.000         |   |
| 2.2.1.3.2  | TPAPD Perangkat Desa Lainnya                                | 48.000.000         | 54.600.000         |   |
| 2.2.1.4    | Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD                       |                    |                    |   |
| 2.2.1.4.1  | Uang Sidang BPD                                             |                    |                    |   |
| 2.2.1.4.2  | TPBPD                                                       | 2.800.000          | 3.650.000          |   |
| 2.2.2      | Belanja Hibah                                               |                    |                    |   |
| 2.2.2.1    |                                                             |                    |                    |   |
| 2.2.3      | Belanja Bantuan Sosial                                      |                    |                    |   |
| 2.2.3.1    | Kegiatan PHBN/PHBI                                          | 2.250.000          | 8.100.000          |   |
| 2.2.3.2    | Kegiatan Bersih Desa                                        |                    | 10.800.000         |   |
| 2.2.3.3    | Per lomba Desa                                              |                    | 2.750.000,00       |   |
| 2.2.3.4    | Pembinaan Hansip                                            |                    | 1.800.000,00       |   |
| 2.2.3.5    |                                                             |                    |                    |   |
| 2.2.3.5    | Dst.....                                                    |                    |                    |   |
| 2.2.4      | Belanja Bantuan Keuangan                                    |                    |                    |   |
| 2.2.4.1    | Operasional Pemerintahan Desa                               | 3.500.000          | 3.500.000          |   |
| 2.2.4.2    | Operasional LPM                                             | 2.000.000          | 2.000.000          |   |
| 2.2.4.3    | Operasional PKK                                             | 3.000.000          | 3.000.000          |   |
| 2.2.4.4    | Operasional Karang taruna                                   | 1.000.000          | 1.000.000          |   |
| 2.2.4.5    | Operasional PJOK/PJAK                                       |                    |                    |   |
| 2.2.4.6    | Operasional Posyandu                                        | 500.000            | 500.000            |   |
| 2.2.4.7    | Operasional RT/RW                                           | 2.800.000          | 3.550.000,00       |   |
| 2.2.4.8    | Operasional Linmas                                          |                    |                    |   |
| 2.2.4.9    | Operasional Koptan/HIPPA                                    |                    |                    |   |
| 2.2.4.10   | Dst.....                                                    |                    |                    |   |
| 2.2.5      | Belanja tak terduga                                         |                    |                    |   |
| 2.2.5.1    | Keadaan Darurat                                             |                    |                    |   |
| 2.2.5.2    | Bencana Alam                                                |                    |                    |   |
| 2.2.5.3    | Dst.....                                                    |                    |                    |   |
|            | <b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>                               | <b>456.300.000</b> | <b>419.050.000</b> |   |
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                |                    |                    |   |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)<br>Tahun sebelumnya |                    |                    |   |
| 3.1.2      | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan               |                    |                    |   |
| 3.1.3      | Penerimaan Pinjaman                                         |                    |                    |   |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                               |                    |                    |   |
| 3.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                                   |                    |                    |   |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal Desa                                       |                    |                    |   |
| 3.2.3      | Pembayaran Hutang                                           |                    |                    |   |
|            | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>                         |                    |                    |   |

Ditetapkan di Garung  
Pada tanggal 5 Maret 2013

KEPALA DESA Garung



**PAMILU HADI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA .GARUNG..... KECAMATAN ..SAMBENG.....  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GARUNG..... KECAMATAN  
SAMBENG.....**

**NOMOR : 188/..01..../413.318.08.04/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA ..GARUNG..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..GARUNG.....  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..GARUNG.....,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Garung..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garung..... Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor      Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor    / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Garung..... Nomor ..03..... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa ..Garung..... membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..Garung..... tahun anggaran 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .GARUNG..... TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..Garung..... Tahun Anggaran 2013**

**Pasal 2**

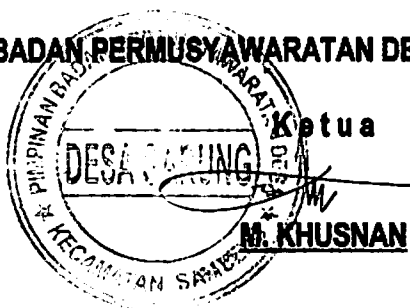
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GARUNG  
Pada tanggal 20 MARET 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GARUNG**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA GARUNG KECAMATAN SAMBENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GARUNG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GARUNG KEC SAMBENG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 01 / 413.318.04. / 2013

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Garung Kecamatan Sambeng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Garung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garung Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Garung mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Garung menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Garung**

*Tanda Tangan:*

1. M. KHUNAN  
Ketua
2. SUWARNO  
Anggota
3. SAMSUL. A  
Anggota
4. UDIN. M  
Anggota
5. RUSANTO  
Anggota
6. TARJI  
Anggota
7. SURASIT  
Anggota

